



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Lengkapi Bukti Untuk Tetapkan Tsk

BENGKULU - Jelang menetapkan tersangka kasus korupsi proyek jalan di batas Kota Kepahiang ke simpang kantor Bupati Kepahiang tahun 2017 yang belum lama ini statusnya dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Dit reskrimsus Polda Bengkulu kemarin (25/2) menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu.

► Baca **LENGKAPI...Hal 7**

Sambungan dari halaman 1

Hampir seluruh ruangan yang ada di Bidang Bina Marga (BM) dimasuki oleh 5 orang penyidik termasuk ruangan satker dan ruangan PPTK. Penyidik yang mengenakan rompi berwarna biru-merah dengan tulisan Tipidkor di bagian belakangnya itu tiba di kantor PUPR provinsi Bengkulu pukul 08.30 WIB dan baru keluar pukul 11.30 WIB membawa 20 bundel besar dokumen yang disimpan dalam kotak plastik.

Dokumen itu langsung dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke Mapolda Bengkulu. tidak ada satu pun penyidik yang mau membeberkan dokumen apa aja yang mereka ambil atau amankan itu. "Nanti di polda saja jangan tanya sama kami," ujar penyidik yang tampak buru-buru menjinjing kotak berisi dokumen.

Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu Kombes. Pol. Ahmad Tarmizi saat dikonfirmasi membenarkan bahwa anggotanya melakukan penggeledahan di kantor Dinas PUPR terkait

pengusutan proyek jalan di Kepahiang. "Memang ada penggeledahan terkait pekerjaan jalan di daerah Kepahiang," kata Tarmizi.

Namun ia belum mendapat laporan dari penyidik mengenai dokumen apa saja yang diamankan dari kantor Dinas PUPR tersebut. "Saya belum tahu, belum dapat laporannya. Yang jelas penggeledahan ini untuk melengkapi alat bukti. Karena kemarin sudah kita naikkan ke penyidikan dan penggeledahan ini merupakan tindak lanjutnya," ujar Tarmizi.

Sejauh ini, lanjut Tarmizi sejak kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan sudah 16 orang saksi yang diperiksa. Namun beliau mengaku tidak ingat siapa-sapa saja yang sudah diperiksa itu dan siapa saja yang berpotensi jadi tersangka. "Kalau tidak salah sudah 16 orang, banyaklah pokoknya," tutupnya.

Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Mulyani Ningsih alias Nining mengaku tidak tahu menahu terkait kasus

Jalan kepahiang yang sedang diusut oleh penyidik Polda Bengkulu. "Saya tidak tahu soal itu ya, waktu itu kan saya belum di sini (PUPR,red)," pungkasnya.

Informasi yang RB terima dari sumber di Polda Bengkulu, rencananya dalam waktu dekat penyidik akan segera menetapkan tersangka yang jumlahnya lebih dari satu orang. Diusutnya kasus ini sejak penyidik menerima laporan dari masyarakat bahwa ada indikasi perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam pekerjaan proyek preservasi rehabilitasi jalan batas kota Kepahiang ke simpang kantor Bupati Kepahiang.

Pekerjaan dengan nilai pagu sebesar Rp 31,6 miliar pada satker di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu itu diduga telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya. Pekerjaan tidak sesuai dengan volume yang terdapat dalam surat perjanjian kerja (kontrak) sehingga menimbulkan kerugian negara. (tew)